



# Kasus Lahan BMW Diungkap Lagi

## Aroma Korupsi Semakin Merebak

**PERSOALAN** lahan Bersih Manusiawi Wibawa (BMW) kembali menuai sorotan publik. Pasalnya, masalah yang mendera di lahan itu seperti hilang ditelan bumi. Padahal belum pernah ada penyelesaian oleh Pemprov DKI Jakarta, baik dalam persoalan status lahan, maupun persoalan pembangunan di lahan itu.

Dalam diskusi yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, berbagai nara sumber hadir mengungkap persoalan itu, satu di antara nara sumber yakni mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Diskusi publik bertajuk 'Mengungkap Dugaan Korupsi di Balik Gagalnya Pembangunan Stadion Olahraga di Taman BMW' menuai antusias sejumlah kalangan.

Sejak awal bergulirnya kasus di lahan BMW, Prijanto cukup vokal mengungkap berbagai data tentang dugaan korupsi dalam pembangunan stadion di Taman BMW yang berlokasi di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bahkan ia sudah melaporkan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prijanto pun sempat mempertanyakan Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Yakni dengan meresmikan pembangunan stadion di Taman BMW pada Mei 2014.

Padahal, saat itu kepemilikan tanah di lokasi yang akan dijadikan stadion masih dalam status sengketa.

"Jokowi bohong, bukan? Kejadian ini dimaknai bahwa gubernur DKI membiarkan dan menutupi kasus korupsi dan kolusi di Taman BMW. Jokowi justru masuk ke dalam pusaran KKN dengan menyertifikasi lahan sengketa," ujar Pri, kemarin (25/4).

Sedangkan pada Januari 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang putusan sengketa kepemilikan lahan untuk pembangunan stadion di Taman BMW. Hasilnya, Pemprov DKI kalah dalam kepemilikan lahan seluas 3 hektare di lahan yang diperebutkan. Berdasarkan putusan tersebut, tanah tersebut menjadi milik PT Buana Permata Hijau.

Menyorot persoalan itu, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah dalam diskusi tersebut menyayangkan munculnya pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang mengalihkan dugaan korupsi Taman BMW sebesar Rp 737 milyar pada tahun 2007 (nilai sekarang

sekitar Rp 2 triliun), dengan mengatakan tidak ada masalah hukum atau masalah hukumnya sudah selesai.

Menurut Amir, patut diduga hal itu diungkapkan Ahok untuk menutupi korupsi oleh pengusaha tertentu. "Upaya Ahok ditengarai karena dia diduga juga terlibat dalam korupsi itu. Pada tahun 2007 lalu, Basuki Tjahja Purnama menjabat sebagai staf khusus Gubernur Sutiyoso, merangkap sebagai konsultan salah satu perusahaan pengembangan besar," beber dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budihartono, menegaskan tanah BMW merupakan aset Pemprov DKI.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan penjiagaan dengan menggandeng TNI, Polri dan juga Satpol PP. "Dengan begitu tidak boleh lagi ada pihak-pihak yang tidak jelas keluar masuk ke lahan itu," pungkask dia. **(wok)**